
ANALISIS KEBUTUHAN LAYANAN DIGITAL *E-GOVERNMENT* DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lily Pebriana S^{1*}, Darius Antoni², Muhamad Akbar³, Widya Cholil⁴

Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Sekayu¹

Program Studi Magister Teknik Informatika, Universitas Bina Darma, Palembang^{2,4}

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau³

e-mail: pebriana.lily@gmail.com¹, dariusantoni@gmail.com²,

muhamad.akbar@binadarma.ac.id³, widya@binadarma.ac.id⁴

Abstrak

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan instansi pemerintahan yang sedang melakukan pengembangan pada kebutuhan layanan digital *e-government*, dalam melakukan pengembangan *e-government* tersebut diperlukan studi untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menghambat dalam layanan digital *e-government*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan *e-government* yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data skunder, data primer berupa *interview* antara peneliti dengan informan dan dokumentasi, sedangkan data skunder berupa data laporan realisasi penyerapan *e-government* disetiap Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil analisis data menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada masih belum bisa optimal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan internet disetiap desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, kapasitas *bandwidth* disetiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kecamatan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bisa akses internet supaya *update* informasi perkembangan *e-government* yang sudah ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kata kunci : *E-Government*; Infrastruktur; Kualitatif

Abstract

Musi Banyuasin Regency is a government agency that is currently developing the need for digital e-government services, in carrying out the development of e-government, a study is needed to find out what are the inhibiting factors in e-government digital services. The purpose of this research is to develop e-government in Musi Banyuasin Regency. Researchers used qualitative methods, using primary and secondary data, primary data in the form of interviews between researchers and informants and documentation, while secondary data in the form of reports on the realization of e-government absorption in each District of Musi Banyuasin Regency. The results of data analysis show that the existing infrastructure is still not optimal to meet the needs of internet services in every village and sub-district in Musi Banyuasin Regency, the bandwidth capacity of each OPD (Regional Device Organization) and sub-district that can be used by the community to be able to access the internet for updates. information on the development of e-government that already exists in Musi Banyuasin Regency.

Keywords : *e-government*; infrastructure; Qualitative

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik berbasis tata kelola yang lebih baik dan berbasis pada *good government*. *Good government* bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah maka diperlukan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis *e-government*.

Langkah awal penerapan *e-government* pada pemerintah adalah lewat media internet dengan membuat website, aplikasi dan sistem informasi yang dirancang oleh masing-masing daerah dan kota. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan salah satu bentuk layanan digital yang disediakan oleh pemerintah kota dan kabupaten sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang cepat dan menurunkan biaya administrasi, memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab serta transparan kepada masyarakat terutama di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang telah menyediakan atau menerapkan *e-government* untuk melayani semua lapisan masyarakat. Contohnya adalah penerapan *Muba Smart Regency* diantaranya program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyuasin dalam mencetuskan program Muba Siaga 112.

Dari penerapan *e-government* yang dilakukan oleh kabupaten musu banyuasin dapat dinyatakan belum pernah dilakukan

studi tentang apakah penerapan *e-government* di Kabupaten Musi Banyuasin telah dilakukan pemerataan ke seluruh pelosok desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Maka dari itu perlu dilakukan studi tentang pemerataan *e-government* yang dilihat dari sisi infrastruktur dengan keadaan geografis Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak persawahan dan rawa-rawa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian nugrogo[1] mengenai analisis *e-government* terhadap pelayanan publik di kementerian hukum dan ham untuk mengetahui tingkat pelayanan pada keementerian hukum dan ham, hal pembeda dari penelitian ini yaitu tidak membahas infrastruktur sebagai media support dari system tersebut. kemudian penelitian ini juga sejalan dengan penelitian widodo[2] mengenai pengembangan *e-government* di pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *smart city*, dimana penelitian ini menggunakan indikator efektifitas sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan triangulasi metode.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan pada *e-government*. Untuk meningkatkan pelayanan pada *e-government* maka diperlukan penelitian tentang sebuah analisis tentang kebutuhan layanan digital *e-government* di pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.

II. TINJAUAN PUSTAKA

e-Government Secara generik bisa didefinisikan menjadi penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan aktivitas pemerintah, yg bertujuan untuk menaikkan efektivitas, efisiensi & penyampaian layanan [3]. Konsep *e-government* diterapkan menggunakan tujuan bahwa interaksi pemerintah baik terhadap masyarakatnya dan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif, &

ekonomis [4]. Dengan adanya sistem *E-Government* ini dapat memudahkan dan mempercepat proses pelayanan yang diberikan kepada OPD Muba dan setiap lapisan masyarakatnya.

Pelayanan publik sebagai tolok ukur keberhasilan aplikasi tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi [5]. Ada tiga alasan krusial yg melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik bisa mendorong praktik good governance pada Indonesia. Pertama, pemugaran kinerja pelayanan publik dievaluasi krusial sang stakeholders, yaitu pemerintah, warga, & sektor usaha. Kedua. Pelayanan publik merupakan ranah menurut ketiga unsur governance melakukan hubungan yg sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yg selama ini mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih gampang & konkret melalui pelayanan public [5].

Adapun aplikasi dan sistem yang tersedia dan bisa diakses pada server Dinkominfo saat ini adalah : Aplikasi SIMDA, CCTV Jalan dan Server mukabab.go.id, ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah agar menggunakan sistem informasi yang efisien dan membangun *IT Infrastructure* dengan memperluas *accessibility* untuk OPD dan setiap lapisan masyarakat yang ada di wilayah Muba khususnya.

Pelayanan Publik *E-Government*

Pemerintahan pada hakikatnya memberikan pelayanan pada warga wajib berlandaskan pada panduan yg bisa menuntun tindakan segala pola konduite aparat kearah yg lebih baik [6], begitu juga pemerintah kabupaten Muba berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan professional kepada setiap lapisan masyarakat yang ada di daerahnya dengan meningkatkan infrastruktur yang merata untuk penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi. Berikut daftar Pemasangan Internet yang Telah Terpenuhi dilingkungan OPD Kabupaten Muba:

Tabel 1. Daftar Pemasangan Internet dilingkungan OPD Muba

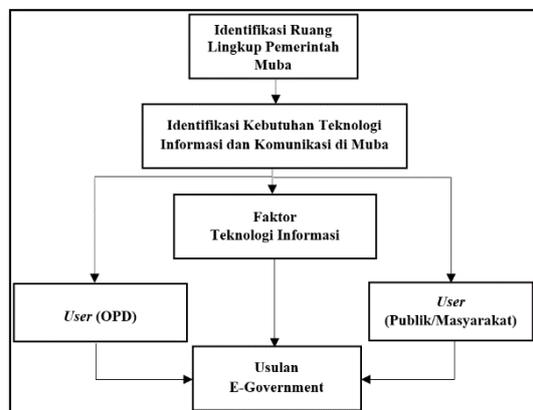
Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Bandwidth Fiber Optic	Bandwidth Vsat
Kantor Bupati/Sekretariat Daerah	50 Mbps	-
Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Mbps	-
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Mbps	-
BAPPEDA	2 Mbps	-
DPMTSP dan ULP	2 Mbps	-
BPKAD	2 Mbps	-
Rumah Dinas Bupati	50 Mbps	-
Rumah Dinas Wakil Bupati	50 Mbps	-
Rumah Dinas Sekda	50 Mbps	-
Dinas Ketahanan Pangan	2 Mbps	-
Balitbangda	2 Mbps	-
Dinas Perikanan	2 Mbps	-
Inspektorat	2 Mbps	-
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	2 Mbps	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Mbps	-
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2 Mbps	-
Dinas Perhubungan	2 Mbps	-
BPBD	2 Mbps	-
Dinas Koperasi dan UKM	2 Mbps	-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2 Mbps	-
Badan Kesbangpol	2 Mbps	-
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2 Mbps	-
Dinas Pertanian	2 Mbps	-
Dinas Perkerjaan Umum	2 Mbps	-
RSUD Sekayu		-

(Sumber : Dinkominfo Muba)

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan studi dan telaah pustaka melalui referensi jurnal ilmiah, konferensi, dan penelitian-penelitian terdahulu, pada penelitian ini penulis membuat kerangka berpikir yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1. Identifikasi Ruang Lingkup Pemerintahan Muba.

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi terhadap ruang lingkup pemerintahan kabupaten ditinjau dari aspek hukum dan undang-undang. Perlu juga dilakukan kajian terhadap pengaturan, asas, prinsip, dan pola penyelenggaraan pelayanan publik. Observasi dilakukan dengan beberapa pegawai yang berkompeten di Dinkominfo terkait infrastruktur dan aksesibilitas di Kabupaten Muba sebagai sampel dalam penelitian ini.

Pengumpulan informasi juga dilakukan melalui penyebaran kuisioner mengenai kebutuhan masyarakat Muba terkait aksesibilitas dan Infrastruktur service *E-Government* Muba. Proses identifikasi ini mengacu kepada upaya meningkatkan kualitas layanan digital *E-Government* Muba agar bisa diakses oleh setiap lapisan masyarakat secara merata.

Dalam proses identifikasi Ruang Lingkup Pemerintah Muba, perlu

diidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam meningkatkan layanan digital *E-Government* Muba.

2. Identifikasi Kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi Muba.

Proses ini meliputi observasi langsung ke OPD Muba melalui Dinkominfo untuk menganalisa manfaat fungsi dari layanan digital *E-Government* sebagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang telah dibangun untuk masyarakat Muba. Juga dilakukan pengkajian yang lebih dalam terhadap perangkat yang diusulkan pada model yang akan diterapkan. Dalam proses ini, akan diteliti bagaimana IT Infrastruktur dan aksesibilitas *E-Government* bisa dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat Muba.

Dalam penerlitan tentang Layanan *E-Government* di Kabupaten Musi Banyuasin, penulis menggunakan metode kualitatif. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpuh pada suatu fokus. Fokus penelitian merupakan sesuatu yang ingin diteliti sebagai akibatnya peneliti bisa merinci balik bahasan yang akan diteliti [7], Penetapan fokus dapat membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria keluar masuk suatu informasi yang diperoleh di lapangan, jadi fokus dalam penelitian kualitatif berasal dari masalah itu sendiri dan fokus dapat menjadi bahan penelitian. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda)

2. Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan secara umum.

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi.

Kemudian analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Tahapan-tahapan metodologi penelitian kualitatif setelah dilakukannya analisis data yaitu;

1. Reduksi data (Data Reduction).

Data diperoleh menurut lapangan yang jumlahnya relatif poly sebagai akibatnya perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data dilakukan menggunakan menciptakan rangkuman data yang diperoleh menurut output wawancara, observasi dan analisis dokumen administrasi dan perangkat pembelajaran guru. Kemudian dilakukan pemilihan dan pengelompokan hal-hal yang utama lalu dicari tema dan pola yang sinkron menggunakan penekanan penelitian [8].

2. Penyajian data (Data Display).

Penyajian data yang dilakukan pada penelitian kualitatif merupakan berbentuk teks deskriptif berdasarkan data catatan lapangan. Penyajian data adalah tahapan buat tahu apa yang

sedang terjadi dan apa yang wajib dilakukan. Selanjutnya buat dianalisis dan diambil tindakan yang dipercaya perlu. Penyajian data dilakukan menggunakan membicarakan data output reduksi kedalam bentuk tabel atau grafik buat mempermudah pada tahu lantaran lebih terorganisir dan tersusun menggunakan pola hubungan[8].

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/verification).

Kegitan ini adalah penarikan konklusi dan memverifikasi temuan data menggunakan teori yg dipakai pada penelitian. Dalam hal ini dilakukan menggunakan cara mendiskripsikan data hasil temuan penelitian pada pembahasan. Pembahasan dilakukan dalam data temuan penelitian menggunakan teori-teori yang dipakai menjadi landasan penelitian [8].

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pegawai dinkominfo yang terkait beberapa hasil dari wawancara yang sudah dilakukan peneliti.

4.1 Tingkat Kepentingan

Daftar tingkat kepentingan pada kebutuhan layanan digital *e-government* di bawah ini digunakan sebagai acuan dalam memberikan nilai pada setiap pertanyaan tingkat kepentingan pada kebutuhan layanan digital *e-government*[9];

Tabel 2. Tingkat Kepentingan

Level	Keterangan
TP	Tidak Penting
KP	Kurang Penting
CP	Cukup Penting
P	Penting
SP	Sangat Penting

(Sumber : Fyonanda, Nurhadryani, JUTI Volume 17 Nomor , Januari 2019)

Adapun pengukuran kuesioner yang dengan menggunakan metode tingkat kepentingan sebagai berikut:

Tabel 3. Kuesioner Tingkat Kepentingan

Pertanyaan	Level				
	TP	KP	CP	P	SP
Seberapa penting konsistensi pemerintah Muba membangun layanan e-government sesuai kebutuhan saat ini?					√

(Sumber : Olah data Dinkominfo & Dinas PMD Muba 2020)

4.2 Tingkat Kematangan

Kemudian dilakukan pengukuran tingkat kematangan pada kebutuhan layanan digital *e-government* di bawah ini digunakan sebagai acuan dalam memberikan nilai tingkat pencapaian pada setiap pertanyaan tingkat kematangan pada kebutuhan layanan *e-government*[9].

Tabel 4. Tingkat Kematangan

Level	Keterangan
1	Proses tidak diimplementasikan atau tidak ada upaya untuk mencapai tujuan proses
2	Proses yang diimplementasikan secara <i>ad-hoc</i> mencapai tujuan proses
3	Proses yang diimplementasikan dan dikelola dengan terencana dan termonitoring
4	Proses yang diimplementasikan dengan batasan-batasan tertentu agar konsisten dalam mencapai hasil yang sudah ditetapkan
5	Proses tersebut dievaluasi dan diperbaiki secara terus menerus

(Sumber : Fyonanda, Nurhadryani, JUTI Volume 17 Nomor , Januari 2019)

Adapun pengukuran kuesioner yang dengan menggunakan metode tingkat kematangan sebagai berikut:

Tabel 5. Kuesioner Tingkat Kematangan

Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden	Level	Hasil
Untuk menuju smart city apakah Pemerintahan Muba sudah mempersiapkan IT Infrastructure yang diperlukan untuk di desa dan kota dengan baik?	Ya, Pemerintah muba sudah mempersiapkan an Tim IT.	5	IT Infrastruktur di Muba sudah dipersiapkan dengan baik agar layanan e-government bisa diakses oleh setiap lapisan masyarakat

Apakah layanan internet sudah bisa terpenuhi untuk masyarakat Muba di desa dan kota?	Ya, Pemerintah Muba sudah memberikan fasilitas wifi area.	5	Pemerintah Muba sudah membangun pemancar satelit disetiap kecamatan dan desa di wilayah Muba.
Apakah yang dilakukan Dinkominfo Muba untuk masyarakat desa dan kota agar bisa mengakses website dan aplikasi online di Pemerintahan Muba?	Pemerintah Muba melalui dinkominfo sudah memfasilitasi internet desa agar masyarakat desa bisa mengakses website dan aplikasi online	5	Pemerintah Muba melalui Dinkominfo sudah memberikan fasilitas internet disetiap kecamatan dan desa untuk mengakses kebutuhan layanan e-government sesuai kebutuhan user. contoh; masyarakat Muba bisa mengajukan pembuatan e-KTP secara online pada Dinas Dukcapil.
Bagaimana pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi di Muba?	Dinkominfo membuka seminar bagi mahasiswa dan masyarakat yg hobi di bidang IT	5	Dinkominfo selalu memberikan peluang untuk mempersiapkan peningkatan SDM menjadi lebih baik dengan membuka seminar tentang IT
Apakah pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik di Muba sudah terintegrasi?	Ya, Layanan aplikasi pemerintahan setiap OPD di Muba dan layanan publik sudah terintegrasi dengan baik,	5	Untuk layanan pemerintah sudah terintegrasi dengan baik melalui Dinkominfo yang mengontrol pada server jaringan SIMDA, Cctv Jalan, dan mukabab.go.id. Sedangkan untuk layanan jaringan internet disetiap kecamatan dan desa difasilitasi Pemerintah Muba melalui Dinas PMD server jaringan internet untuk mengontrol wifi disetiap kecamatan dan desa di wilayah Muba.

(Sumber : Olah data Dinkominfo & Dinas PMD Muba 2020)

4.3 Triangulasi Metode

Setelah melakukan analisis tingkat kepentingan dan tingkat kematangan di atas kemudian dilakukan pengecekan hasil penelitian dengan metode Triangulasi.

Triangulasi metode adalah usaha untuk mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian [10], dalam kasus ini yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga level kepercayaan dapat valid. Peneliti menggunakan semua teknik pengumpulan data untuk memperkuat keabsahan data yang diperoleh.

Tabel 6. Triangulasi metode

Pertanyaan	Metode Penelitian	
	Wawancara	Observasi
Pemerintah telah menerapkan <i>e-government</i> dalam melaksanakan pelayanan publik	Pemerintahan Kab. Muba sudah menggunakan <i>e-government</i> dalam pelayanan publik	Dari pengamatan, semua OPD di Kab. Muba sudah menerapkan <i>e-government</i> .
Pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di pemerintahan Kab. Muba	Masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan aplikasi berbasis elektronik, seperti pengajuan pembuatan KTP yang bisa diakses kapan saja. Pemerintahan Kab. Muba juga membutuhkan media yang dapat memudahkan setiap OPD dan masyarakat dalam melakukan kegiatan administrasi yang efektif dan efisien serta aman.	Kebutuhan masyarakat dalam layanan digital <i>e-government</i> sesuai kebutuhan menggunakan <i>model e-government</i> yang mudah dimengerti dan dapat diakses kapan saja. Fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan agar OPD dan masyarakat bisa menggunakan, seperti penyediaan fasilitas wifi area di Muba

(Sumber : Olah data Dinkominfo & Dinas PMD Muba 2020)

4.4 Usulan Model

Pada tahap ini usulan model *e-Government* akan meliputi perencanaan pengembangan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, pengembangan komunikasi, serta keamanan

sistem informasinya. Termasuk di dalam tahap ini usulan pengembangan jaringan baik lokal maupun internet. Usulan model *e-Government* ini mengikuti tiga pola implementasi Teknologi Informasi, yaitu:

1. *Government to Citizens*

Tipe *G-to-C* ini merupakan aplikasi *e-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).

Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *e-Government* bertipe *G-to-C* adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanla-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

2. *Government to Business*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuaha entity berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi

relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industry swasta.

3. *Government to Governments*

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entity-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan *e-government* di Kabupaten Musi banyuasin sudah merepresentasikan tiga hal berdasarkan tipe relasi dari E-Government yaitu a) *Government to Citizen (G-to-C)*. b) *Government to Business (G-to-B)*. c) *Government to Government (G-to-G)*. maka dari itu *e-government* di Kabupaten Musi banyuasin dapat di anggap “berhasil” diterapkan sejak tahun 2013.

VI. SARAN

Mengacu pada kesimpulan diatas, ada beberapa saran perihal penerapan Electronic Government dalam pelayanan publik yang secara strategis dapat menentukan kinerja pelayanan publik berbasis electronic, yakni sebagai berikut :

1. Penerapan *e-government* pada Dinkominfo disarankan untuk *upgrade* pada pengembangan kompetensi dan evaluasi secara terus menerus dalam hal ini pelayanan berbasis elektronik yang sudah diterapkan saat ini agar lebih efektif dan efisien bagi pengguna yaitu; baik OPD terkait ataupun masyarakat Muba.

2. Opsi yang diarahkan untuk sumber daya manusia agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang sistem informasi Kabupaten Musi Banyuasin agar bisa diakses lebih mudah dan lebih dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Nugroho, “Analisis E-government Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum Dan Ham (Analysis of E-government to Public Services in the Ministry of Law and Human Rights),” *J. Ilm. Kebijakan. Huk.*, vol. 10, no. 3, pp. 279–296, 2016.
- [2] N. Widodo, “Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang),” *J. Ilm. Adm. Publik*, vol. 2, no. 4, pp. 227–235, 2016, doi: 10.21776/ub.jiap.2016.002.04.15.
- [3] J. T. Nugraha, “E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman),” *J. Komun. Dan Kaji. Media*, vol. 2, no. 1, pp. 32–42, 2018.
- [4] E. Pera Irawan, “Website Utilization in Cyber PR Activities to Promote e-Government Service in South Tangerang Administration,” *J. IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetah. dan Teknol. Komunikasi)*, vol. 19, no. 2, pp. 163–177, 2017.
- [5] S. Amalia, “Reformasi Birokrasi 4.0 : Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0,” *J. Wacana Kinerja Kaji. Prakt. Kinerja dan Adm. Pelayanan Publik*, vol. 21, no. 2, pp. 1–18, 2018, doi: 10.31845/jwk.v21i2.133.

-
- [6] K. Endah, "Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik," *Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 4, no. 1, pp. 141–151, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1088>.
- [7] M. R. Adam, Y. Cikusin, and K. Khoiron, "GERAKAN PURITANISME DAN PELUANG PARIWISATA ISLAM DI KEPULAUAN SAPEKEN (Studi Pada Organisasi Persatuan Islam Di Sapeken Sumenep-Madura)," *Respon Publik*, vol. 15, no. 3, pp. 10–19, 2021, [Online]. Available: <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/9993>.
- [8] S. Raibowo, Y. E. Nopiyanto, and M. K. Muna, "Pemahaman Guru PJOK Tentang Standar Kompetensi Profesional," *J. Sport Educ.*, vol. 2, no. 1, p. 10, 2019, doi: 10.31258/jope.2.1.10-15.
- [9] H. Fryonanda, H. Sokoco, and Y. Nurhadryani, "Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dengan Cobit 5 Dan Itil V3," *JUTI J. Ilm. Teknol. Inf.*, vol. 17, no. 1, p. 1, 2019, doi: 10.12962/j24068535.v17i1.a717.
- [10] B. S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknol. Pendidik.*, vol. 10, pp. 46–62, 2010.